IMPLEMENTASI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Romi Eka Mahardhika Erfa dan Nur Laila Meilani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study aims to determine describe and analyze the implementation of Building Permits (IMB) and determine factors - factors that affect the implementation of Building Permits (IMB) in Pekanbaru. This research uses qualitative methods. The data source consists of primary data and secondary data. The data collected with observation, interviews and documentation. Analysis using the Interactive Data Analysis Model Miles and Huberman. data obtained, processed to be reduced, so that the general conclusions to be drawn. The results showed that the implementation of policy Retribusi building permit in the city of Pekanbaru is not going well, still marked by the number of people who want to build do not want to take care of the building permit for various reasons, then the building permit policy implementation did not go well due to sanctions should be given to people who have not run the building. factors affecting the Building Permit Policy Implementation in the city of Pekanbaru is communication between the Department of Spatial Planning and Building communities assessed Pekanbaru City is still not optimal, then facilities and infrastructure owned by Department of Spatial Planning and Building also insufficient to maximize the activities of the Department of Spatial Planning and building Pekanbaru.

Abstrak: Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman. data-data yang diperoleh, diolah untuk direduksi, sehingga dihasilkan kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang ingin membangun tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan berbagai macam alasan, kemudian implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik dikarenakan sanksi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki bangunan tidak berjalan. faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru yaitu Komunikasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan masyarakat dinilai masih belum optimal, Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan Bangunan juga kurang mencukupi untuk memaksimalkan kegiatan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: kebijakan publik, implementasi, izin mendirikan bangunan

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengolah dan memberdayakan daerahnya sendiri. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini merupakan upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 disebutkan sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan di sektor pajak dan retribusi merupakan sumber utama penerimaan negara yang perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Di samping dari pendapatan pajak, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Retribusi mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Tercatat realisasi PAD di sektor retribusi khusus nya retribusi IMB pada tahun 2011 mencapai 27 miliar lebih. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menerapkan aturan-aturan dalam pemungutan retribusi sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010 yang kemudian diganti dengan Perda nomor 7 tahun 2012. Penerbitan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

Perkembangan Kota Pekanbaru saat ini semakin pesat, dimana Kota Pekanbaru saat ini bergerak menjadi Kota Metropolitan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan membandingkan bangunan yang berdiri baik bangunan pemerintah, sekolah, masyarakat maupun bangunan layanan umum lainnya. Perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru tidak sejalan dengan kepemilikan surat IMB atas bangunan tersebut, masih banyak bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB, terlebih lagi bangunan-bangunan yang berdiri di pinggir-pinggir kota, seperti di perbatasan antara kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Pertokoan dan bangunan yang berdiripun seringkali tanpa aturan dan memperhatikan ruang terbuka hijau. Kemudian di jalan Arifin Ahmad, banyak sekali bangunan yang berada dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan.

SK IMB yang dikeluarkan dari tahun 2010 sampai 2012 memang mengalami peningkatan, dimana tahun 2010 sebanyak 1240 SK, tahun 2011 sebanyak 1268 SK, dan tahun 2012 sebanyak 1386 SK. Akan tetapi pada saat sekarang ini Tercatat 140 ribu bangunan rumah tinggal yang mengantongi IMB dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan sekitar 100 ribuan tak memiliki IMB. Ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam mengurus Izin mendirikan Bangunan. Selain itu permasalahan yang dihadapi juga dirasakan dari faktor internal, seperti kurangnya sarana dan prasarana kendaraan dan SDM di instansi yang terkait. Ini menyebabkan lemahnya pengawasan dan penertiban untuk perolehan pendapatan daerah melalui IMB.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meng-

analisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih bebas struktur dan sistematikanya, tidak terikat secara kaku seperti penelitian kuantitatif. Penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan subjek dalam penelitian ini adalah staf-staf pegawai di Dinas tata ruang dan bangunan Kota Pekanbaru yakni, Kepala bidang bangunan, Kepala bagian pengawasan, beberapa orang staf dan beberapa orang masyarakat. Objek dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*), yakni:

Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Sasaran utama dari kebijakan IMB adalah yakni seluruh pengguna ruang di Kota Pekanbaru, tidak hanya pihak masyarakat dan swasta, pemerintah juga harus mengikuti kebijakan ini. Kebijakan IMB tidak hanya diperuntukkan bagi yang ingin membangun, kegiatan merenovasi juga diwajibkan untuk memiliki IMB. Sedangkan tujuan dari kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini adalah sebagai alat untuk mengontrol, mengarahkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang kota Pekanbaru.

Tujuan dari kebijakan IMB yang lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atas bangunan yang didirikannya. Bagi bangunan yang telah memiliki IMB secara teknis bangunan tersebut sudah handal sehingga ada rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kemudian kepemilikan IMB juga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk

memperoleh pelayanan dan infrastruktur dari pemerintah, bagi bangunan yang memiliki IMB berhak untuk mengajukan infrastruktur jalan, parit, drainase, listrik, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Sumber-sumber Kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan IMB perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya material (*material resources*). Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan memerlukan fasilitas yang mendukung bagi pelaksana seperti tunjangan pegawai atau imbalan.

Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasinya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

Komunikasi sangat menentukan dalam keberhasilan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. Kebijakan IMB efektif apabila pegawai-pegawai yang ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, informasi-informasi yang mereka terima harus jelas dan konsisten, jangan sampai informasi yang mereka terima bias dan tidak jelas, akibatnya pegawai akan menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman mereka sendiri, sehingga tujuan dan maksud dari kebijakan IMB sulit untuk dicapai. Ko-

munikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru cukup baik, komunikasi antar bidang dan antar pegawai berjalan dengan lancar.

Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Dalam mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan IMB menjadi maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana atau pegawai yang mencakupi struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Salah satu unsurnya yang mempengaruhi implementasi yaitu kompetensi dan ukuran pegawai dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, apakah pegawai dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pegawai di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sudah kompeten di bidangnya.

Karakter dari para pelaksana kebijakan harus berkarakteristik ketat, keras dan taat pada aturan yang berlaku. Kebijakan IMB ini dapat berjalan dengan maksimal dipengaruhi oleh karakteristik pegawainya, seberapa tegas pegawai dalam menjalankan kebijakan IMB ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IMB, namun masyarakat masih banyak yang tidak memenuhi dari persyaratan yang telah ditetapkan dengan berbagai banyak alasan. Persyaratan yang tidak lengkap pastinya tidak akan bisa memiliki IMB.

Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan IMB, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi kebijakan IMB. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus IMB, mereka mau mengeluarkan biaya yang dibutuhkan di dalam pengurusan IMB.

Kecendrungan Pelaksanaan

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan tidak hanya berasal dari pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan saja, akan tetapi masyarakat juga dianggap sebagai pelaksana dari kebijakan IMB. Tidak sedikit masyarakat tidak menerima atau menolak dari kebijakan IMB ini. Kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan Kota Pekanbaru diatur didalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012. Dalam Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru, terdapat empat kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan

Masyarakat yang ingin mendirikan bangunan harus memperoleh izin dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, untuk memperoleh surat izin mendirikan bangunan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon

2. Pemanfaatan

Bangunan bisa dimanfaatkan apabila bangunan tersebut sudah dinyatakan untuk layak fungsi, dengan demikian bangunan tersebut secara teknis konstruksi, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2012. Untuk menetapkan bangunan tersebut layak fungsi atau tidak Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang akan melakukan pengawasan dan pengecekan bangunan tersebut, bangunan yang sudah berdiri juga harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan agar bangunan tersebut tetap memenuhi persyaratan layak fungsi.

3. Pelestarian

Kota Pekanbaru banyak sekali memiliki bangunan-bangunan yang memiliki sejarah, bangunan-bangunan sisa zaman penjajahan dan di tetapkan sebagai cagar budaya yang dinilai masih layak huni, didalam Perda No 07 Tahun 2012 bangunan-bangunan tersebut wajib dilakukannya pelestarian dengan cara melakukan perbaikan, pemugaran, perlindungan dan pemeliharannya. Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan tidak boleh menyalahi ketentuan fungsi dan karakter cagar budaya. Perbaikan dan pemugaran yang dilakukan oleh pemilik juga

harus mengikuti aturan yang telah di tetapkan di dalam peraturan daerah, agar nilai atau karakter dari cagar budayanya tidak hilang, apabila perbaikan dan pemugaran yang telah dilakukan menyalahi ketentuan maka harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pembongkaran

Menurut Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012, pembongkaran dapat dilakukan apabila bangunan tersebut tidak layak fungsi, dapat menimbulkan bahaya, tidak memiliki IMB, menyimpang dari perencanaan, dan menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bagi yang melanggar aturan tidak hanya pembongkaran akan tetapi ada sanksi denda dan pidana. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2012 di lapangan masih lemah, masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan. Pembangunan gedung yang dilakukan pemilik banyak yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2012 Pasal 84 angka 4, dimana sebelum kegiatan membangun dilaksanakan pemilik bangunan wajib memasang papan IMB. tidak hanya itu saja, bangunan-bangunan yang sudah berdiri juga banyak yang melanggar pasal 81, yakni tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Kendati sudah jelas melanggar Peraturan, pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak buru-buru untuk melakukan pembongkaran dan perubuhan, pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih mengedepankan cara persuasif, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemutihan bagi bangunan-bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Komunikasi

Dinas Tata Ruang dan Bangunan mengakui bahwa informasi yang mereka berikan kepada Masyarakat masih kurang. Selama ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi melalui media massa, media cetak dan pemasangan billboard namun masih kurang efektif. Dinas Tata Ruang dan Bangunan selama ini mengalami hambatan dalam me-

nyampaikan informasi langsung kepada masyarakat, seharusnya Dinas Tata Ruang dan Bangunan langsung turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan mengenai IMB dan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkendala di sumber daya manusia, dengan masyarakat yang jumlahnya hampir satu juta jiwa dan jumlah pegawai hanya 12 orang tidak memungkinkan untuk menyampaikan informasi satu-satu orang.

Sumber Daya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staff yang mengurus bagian perizinan berjumlah 15 orang tidak sebanding dengan pekerjaannya yang banyak, sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Bidang Pengawasan. Informasi mengenai kebijakan IMB sangat penting bagi staff pelaksana dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Kurangnya pengetahuan staff mengenai Kebijakan IMB berimplikasi pada keberlangsungan kebijakan IMB, kurangnya pengetahuan mengenai IMB dapat menyebabkan dapat menimbulkan inefisiensi dari kebijakan IMB. Masyarakat juga dianggap sebagai pelaksana dari implementasi kebijakan IMB, masyarakat juga harus tahu banyak mengenai informasi mengenai IMB, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang IMB. Pada saat sekarang ini fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan Bangunan berjumlah 5 unit. Kendaraan operasional yang hanya 5 unit dapat menghambat kegiatan dari staff untuk melakukan tugasnya, idealnya agar kebijakan ini berjalan efisien seharusnya satu kecamatan 1 unit mobil operasional atau 1 orang satu unit.

Disposisi

Sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda

dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit. Pegawai dan staff yang ada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sangat mendukung kebijakan IMB, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan tidak terlihat adanya sikap penolakan dari staff.

Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktural paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur operasional standar (SOP). Sebagian kalangan menilai SOP cenderung menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan karena mendorong pelestarian status quo, namun demikian SOP juga bermanfaat karena tindakan yang diseragamkan menimbulkan fleksibilitas. SOP yang ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan sudah cukup jelas, waktu penyelesaian permohonan IMB sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis selambat-lambatnya 30 hari kerja. Menurut masyarakat proses pembuatan IMB terlalu lama dan berbelit-belit

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang ingin membangun tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik dikarenakan sanksi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki bangunan tidak berjalan, sesuai di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru yakni Komunikasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan masyarakat dinilai masih belum optimal, ditandai masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan masih sangat kurang, hanya sekitar 15 orang yang mengurus bagian perizinan, ini tidak memungkinkan mereka untuk mengelilingi 15 Kecamatan dan 58 Kelurahan yang ada di Kota

Pekanbaru. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan Bangunan juga kurang mencukupi untuk memaksimalkan kegiatan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Dye, Thomas, R, 2005. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Precentice Hall
- Ichsan, Moh., dkk. 1997. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marihot P, Siahaan. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Ismail. 2009. *Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nugroho. D, Riant, 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ruslan, Rosady, 2004. *Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tjokoamidjojo, B, 2001. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.